

Identitas nasional : Identitas negara dan legitimasi politik studi komparatif antar bangsa

Muhammad Rafi Febrian

¹ Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mrafifebrian6002@gmail.com

Kata Kunci:

identitas negara, legitimasi politik, demokrasi, otoritarianisme, multikulturalisme, studi komparatif

Keywords:

state identity, political legitimacy, democracy, authoritarianism, multiculturalism

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hubungan antara konstruksi identitas negara dan legitimasi politik dalam berbagai sistem pemerintahan, dengan pendekatan studi komparatif antarbangsa. Identitas negara dipahami sebagai hasil konstruksi politik yang digunakan untuk memperkuat kohesi sosial dan membangun dasar legitimasi kekuasaan. Dalam negara demokratis, identitas cenderung dibentuk secara inklusif untuk mengakomodasi keberagaman, sehingga meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap negara. Sebaliknya, dalam rezim otoriter, identitas sering dikonstruksi secara eksklusif untuk mempertahankan dominasi kekuasaan, yang berpotensi menciptakan eksklusi dan ketegangan sosial. Melalui analisis kasus dari beberapa negara seperti Kanada, Tiongkok, dan Indonesia, kajian ini menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam merumuskan

identitas nasional yang adil dan adaptif sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan legitimasi politik. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan identitas yang inklusif dalam merawat keberagaman dan memperkuat fondasi politik negara di era global.

ABSTRACT

This study explores the relationship between the construction of state identity and political legitimacy across different systems of governance using a cross-national comparative approach. State identity is understood as a political construct employed to foster social cohesion and establish the foundation of state authority. In democratic regimes, identity is typically formed inclusively to accommodate diversity, thereby enhancing citizen participation and trust in state institutions. In contrast, authoritarian regimes often construct identity in an exclusive manner to maintain power, which can result in social exclusion and conflict. By analyzing cases such as Canada, China, and Indonesia, this study reveals that a state's ability to develop a fair and adaptive national identity significantly influences its political legitimacy and stability. The findings highlight the importance of inclusive identity frameworks in managing diversity and strengthening political foundations in an increasingly globalized world.

Pendahuluan

Identitas negara merupakan konstruksi sosial dan politik yang berperan penting dalam membentuk loyalitas warga negara serta legitimasi kekuasaan suatu rezim. Dalam konteks modern, identitas negara tidak hanya ditentukan oleh unsur-unsur historis seperti bahasa, etnisitas, atau agama, tetapi juga dibentuk melalui narasi resmi, simbol-simbol nasional, dan kebijakan negara yang terus diperbarui seiring dinamika global dan domestik. Identitas nasional memiliki peran strategis dalam memperkuat geostrategi dan geopolitik negara, terutama dalam upaya membangun keberlanjutan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dan mempertahankan kedaulatan di tengah dinamika global yang terus berubah (Faslah, 2024).

Di sisi lain, legitimasi politik menjadi fondasi utama bagi stabilitas dan keberlangsungan suatu pemerintahan. Pemerintah yang mampu membangun identitas negara yang inklusif dan diterima secara luas cenderung memperoleh legitimasi yang lebih kuat di mata rakyatnya.

Identitas negara merupakan unsur penting dalam membangun legitimasi politik. Di berbagai negara, identitas nasional dikonstruksi untuk memperkuat kekuasaan, membangun kohesi sosial, atau justru memicu eksklusivitas. Dalam masyarakat multikultural, pengakuan atas identitas kelompok menjadi aspek penting dalam membangun keadilan sosial dan legitimasi politik. Kegagalan dalam memberikan pengakuan yang setara dapat mengarah pada marginalisasi dan konflik identitas dalam ruang publik (Taylor, 1994).

Kompleksitas ini muncul karena identitas tidak hanya dibentuk oleh faktor internal, seperti sejarah dan budaya lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global, seperti arus migrasi, intervensi politik asing, dan penetrasi budaya global. Oleh karena itu, studi komparatif terhadap bagaimana negara-negara mengelola identitas nasionalnya menjadi penting untuk memahami strategi legitimasi kekuasaan dalam berbagai sistem politik dan konteks sosial yang berbeda.

Pembahasan

Identitas Negara sebagai Konstruksi Politik

Identitas negara bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil konstruksi politik yang melibatkan simbol, sejarah bersama, bahasa, agama, dan narasi resmi yang diproduksi oleh negara. Negara menggunakan identitas ini untuk menciptakan rasa persatuan dan loyalitas, sekaligus membedakan diri dari kelompok lain. Dalam banyak kasus, identitas negara juga menjadi alat kontrol dan legitimasi kekuasaan, dengan menetapkan siapa yang dianggap "warga sejati" dan siapa yang berada di pinggiran.

Misalnya, di Prancis, identitas negara dibentuk berdasarkan prinsip *laïcité* (sekularisme), yang menjunjung tinggi pemisahan agama dari ruang publik. Sementara itu, di Turki era Atatürk, identitas negara dikonstruksi melalui kebijakan sekularisme radikal dan Turkifikasi sebagai upaya menggantikan identitas Ottoman yang multietnis dan religius. (Amelia & Sholikha, n.d.) dalam laporan pengabdianannya menjelaskan bahwa representasi agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap realisasi budaya lokal, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi landasan dalam praktik sosial dan tradisi masyarakat setempat.

Identitas dan Legitimasi Politik dalam Sistem Demokrasi

Dalam sistem demokrasi, negara cenderung membangun identitas yang bersifat inklusif dan pluralistik sebagai dasar legitimasi politik. Identitas yang terbuka memungkinkan terciptanya rasa kepemilikan bersama atas negara, terutama dalam masyarakat multikultural. Identitas nasional merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter bangsa, karena mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pegangan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mulyoto, 2021).

Contohnya, Kanada mengadopsi identitas nasional berbasis multikulturalisme resmi, yang memberikan ruang bagi berbagai etnis dan agama untuk tetap mempertahankan identitas budaya mereka, sembari menjadi bagian dari komunitas nasional. Pendekatan ini memperkuat legitimasi negara karena warga merasa diakui dan dilibatkan secara setara dalam kehidupan bernegara.

Identitas dan Legitimasi Politik dalam Sistem Otoritarian

Sebaliknya, dalam sistem otoritarian, identitas negara sering digunakan untuk memperkuat monopoli kekuasaan dan menekan perbedaan. Narasi identitas tunggal sering dilegitimasi oleh sejarah atau agama resmi, dan kelompok minoritas bisa mengalami marginalisasi.

Contohnya, China membangun identitas nasional berdasarkan Han-sentrisme dan modernitas ekonomi, yang digunakan untuk mendukung legitimasi Partai Komunis. Kelompok seperti Uighur dan Tibet kerap dikonstruksikan sebagai “pengganggu” kesatuan nasional. Di sini, legitimasi politik tidak lahir dari partisipasi rakyat, melainkan dari narasi stabilitas dan kebesaran negara yang dijaga oleh kekuasaan pusat.

Ketegangan antara Identitas dan Demokratisasi

Dalam banyak negara berkembang atau pascakolonial, seperti Indonesia, proses pembangunan identitas negara dihadapkan pada ketegangan antara warisan kolonial, pluralisme etnis-agama, dan upaya demokratisasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan upaya membangun identitas inklusif, namun dalam praktiknya, konflik horizontal dan eksklusi terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi.

Ini menunjukkan bahwa membangun identitas negara yang mampu menopang legitimasi politik memerlukan keseimbangan antara pengakuan atas keberagaman dan narasi persatuan yang tidak menindas.

Implikasi Politik Identitas bagi Stabilitas dan Integrasi Nasional

Identitas negara yang terbuka dan adaptif berpotensi memperkuat legitimasi politik jangka panjang, karena memberi ruang partisipasi bagi semua kelompok. Sebaliknya, identitas yang eksklusif dan dipaksakan rentan menimbulkan konflik sosial dan delegitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, keberhasilan negara dalam menjaga legitimasi tidak lepas dari kemampuannya dalam merawat identitas nasional secara adil dan kontekstual.

Dalam merawat identitas nasional secara adil dan kontekstual, negara perlu mengembangkan kebijakan yang mencerminkan keragaman masyarakatnya, baik dalam aspek budaya, bahasa, agama, maupun nilai-nilai sosial. Pendekatan ini menuntut negara untuk tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga fasilitator dialog antar kelompok, serta pelindung hak-hak minoritas. Pendidikan kewarganegaraan yang inklusif, pengakuan terhadap warisan budaya lokal, dan representasi yang seimbang dalam lembaga politik menjadi instrumen penting dalam proses ini (Dewi & Najicha, 2024).

Lebih jauh, negara juga harus responsif terhadap perubahan sosial dan dinamika global yang terus berkembang. Globalisasi, migrasi, dan perkembangan teknologi

informasi telah membawa tantangan baru bagi konsep identitas nasional. Dalam konteks ini, negara tidak dapat lagi mengandalkan narasi identitas yang kaku dan tunggal. Diperlukan fleksibilitas dan keterbukaan dalam membentuk identitas yang tidak hanya mengikat secara emosional, tetapi juga relevan secara fungsional di tengah arus perubahan zaman.

Identitas Negara sebagai Konstruksi Politik

Identitas negara dilihat sebagai konstruksi politik yang digunakan untuk membangun kesatuan nasional sekaligus melegitimasi kekuasaan. Negara-negara secara aktif membentuk identitas melalui simbol-simbol, narasi sejarah, bahasa resmi, dan kebijakan budaya. Identitas ini tidak netral, melainkan merupakan hasil negosiasi atau bahkan dominasi kelompok tertentu atas yang lain. Dalam konteks ini, identitas negara menjadi alat penting dalam menentukan siapa yang dianggap sebagai bagian dari bangsa dan siapa yang berada di luar batasnya.

Dalam sistem demokrasi, identitas negara cenderung dibentuk secara inklusif agar mencerminkan keragaman masyarakat. Hal ini penting karena legitimasi politik dalam demokrasi bertumpu pada pengakuan dan partisipasi warga negara. Negara-negara seperti Kanada, misalnya, menjadikan multikulturalisme sebagai dasar identitas nasional, yang memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Identitas yang terbuka dan pluralistik memberi ruang bagi berbagai kelompok untuk merasa memiliki negara, sehingga memperkuat legitimasi kekuasaan.

Pembahasan dimulai dengan pemahaman bahwa identitas negara adalah konstruksi politik yang dibentuk secara sengaja oleh negara melalui narasi sejarah, simbol nasional, bahasa resmi, dan kebijakan publik. Identitas ini tidak muncul secara alamiah, melainkan dibangun untuk memperkuat legitimasi negara dan menciptakan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, negara memilih elemen budaya tertentu untuk diangkat sebagai identitas bersama, yang sering kali menyisihkan keragaman lain.

Selanjutnya dibahas bagaimana sistem politik memengaruhi bentuk identitas dan legitimasi. Dalam negara demokrasi, identitas negara biasanya bersifat plural dan terbuka, karena legitimasi politik bergantung pada penerimaan rakyat yang beragam latar belakang. Sebaliknya, dalam rezim otoriter, identitas dibentuk secara eksklusif sebagai alat kendali. Narasi tunggal tentang "kebangsaan" digunakan untuk membatasi kebebasan, menekan oposisi, dan menyatukan rakyat di bawah kekuasaan.

Pembahasan kemudian memperdalam dampak sosial dari konstruksi identitas negara, terutama di negara-negara multikultural. Tantangan muncul ketika negara harus menyatukan kelompok yang berbeda etnis, agama, dan sejarah dalam satu identitas nasional. Ketegangan ini sering menyebabkan konflik, terutama jika negara gagal menciptakan narasi yang inklusif. Di sinilah legitimasi politik diuji—bukan hanya pada kekuatan hukum atau ekonomi, tetapi juga pada kemampuan negara untuk menjamin rasa keadilan dan pengakuan bagi semua warga.

Kesimpulan dan Saran

Identitas negara merupakan elemen strategis dalam membangun dan mempertahankan legitimasi politik. Melalui konstruksi simbol, narasi sejarah, dan kebijakan budaya, negara menciptakan identitas yang mendefinisikan siapa yang termasuk dalam komunitas nasional. Dalam konteks demokrasi, identitas yang bersifat inklusif cenderung memperkuat legitimasi dengan meningkatkan rasa kepemilikan rakyat terhadap negara. Sementara itu, dalam sistem otoriter, identitas sering dibentuk secara sempit untuk menjaga kontrol kekuasaan, yang justru dapat memicu konflik sosial dan delegitimasi.

Dari studi perbandingan terhadap beberapa negara, terlihat bahwa keberhasilan dalam mengelola identitas nasional secara adil, adaptif, dan pluralistik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik jangka panjang. Identitas negara yang mampu merangkul keragaman memberikan fondasi yang lebih kuat bagi negara untuk menghadapi tantangan global dan domestik.

Daftar Pustaka

- Amelia, R., & Sholikhah, A. I. (N.D.). EXECUTIVE SUMMARY REPRESENTASI AGAMA TERHADAP REALISASI BUDAYA DI DESA CLUMPRIT.
- Dewi, K. S., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Strategi Mempertahankan Identitas Nasional Era Globalisasi. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 33–38. <https://doi.org/10.56393/Decive.V4i1.2066>
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, Dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Mulyoto, G. P. (Director). (2021). *Identitas Nasional Dalam Karakter Bangsa* [Video Recording]. <http://repository.uin-malang.ac.id/10835/>
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining The Politics Of Recognition*. ERIC.